



Nestapa Anak Bangsa

Cecep Darmawan

Guru Besar dan Dekan FPPI Universitas Pendidikan Indonesia

PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) lagi-lagi kembali menjadi sorotan publik. Alih-alih disambut sebagai kebijakan visioner, program itu justru menuai kritik akibat maraknya kasus keracunan yang menimpa peserta didik di berbagai daerah. Di Kabupaten Bandung Barat, misalnya, ditetapkan status kejadian luar biasa (KLB) terkait dengan kasus keracunan massal peserta didik setelah menyantap hidangan MBG. Belum selesai kasus di Kabupaten Bandung Barat, disusul kejadian serupa di Kabupaten Garut.

Fenomena-fenomena itu semestinya menjadi perhatian serius agar program itu <i>on the track</i> menjadi kebijakan yang berdampak. Tujuan utamanya mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi peserta didik, memperbaiki kesehatan generasi muda, sekaligus menopang pembangunan sumber daya manusia Indonesia pada masa depan. Jangan sampai MBG menjadi nestapa bagi anak-anak bangsa.

Namun, di balik visi mulia tersebut, pemerintah tidak boleh abai dan menutup telinga atas berbagai kasus yang cukup mengkhawatirkan dan berbagai kritik yang datang terhadap program MBG itu. Misalnya kritik terhadap menu MBG yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang, bahkan sebagian tempat rawan menggunakan bahan tambahan pangan yang belum tentu sehat.

Selain itu, beberapa pihak pun mengkritik soal jaminan higienitas alat dan dapur MBG. Pasalnya sebagaimana data yang dilansir dari *website* Kantor Staf Kepresidenan (KSP) (2025), mengutip dari laporan Kementerian Kesehatan per 22 Sep-

tember 2025, tercatat hanya 34 dari 8.583 dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang memiliki sertifikat laik hygiene dan sanitasi (SLHS).

Kondisi itu, jika dibiarkan, tentu dapat mengguncang kepercayaan publik terhadap implementasi program yang seharusnya membawa manfaat besar. Apalagi, MBG menyangkut hajat hidup anak-anak bangsa, yakni keselamatan, kesehatan, dan terpenuhinya gizi anak-anak Indonesia.

Dengan situasi itu, muncul desakan dari berbagai pihak yang meminta agar pemerintah menghentikan sementara, mengevaluasi secara menyeluruh, dan menata ulang pelaksanaan MBG agar tidak sekadar menjadi program populis, tetapi benar-benar berdampak positif bagi kesehatan peserta didik.

TRANSFORMASI MANAJERIAL

Program MBG secara esensial memiliki tujuan yang baik. Oleh karena itu, tidak boleh dihentikan total, tetapi dihentikan sementara untuk mengevaluasi program. Pemerintah perlu mengambil langkah evaluasi menyeluruh agar program itu tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan.

Setidaknya ada beberapa hal yang mendesak untuk diperhatikan.

Pertama, evaluasi tata kelola MBG. Pemerintah perlu menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Tata kelola distribusi, mekanisme pengadaan, hingga pemantauan harus diperbaiki agar tidak menimbulkan kerugian bagi peserta didik.

Kedua, mengedepankan *quality control* yang ketat. Setiap penyedia

makanan wajib memiliki sertifikat higienis dan kelayakan sesuai dengan standar keamanan pangan. Lebih dari itu, standar kebersihan, gizi seimbang, dan keamanan pangan harus diterapkan secara konsisten. Jangan sampai ada ruang kompromi sebab program itu menyangkut kesehatan dan keselamatan ribuan bahkan jutaan anak.

Ketiga, melibatkan pakar gizi dan kesehatan. MBG tidak bisa hanya dikelola birokrasi. Keterlibatan pakar gizi, pakar kesehatan masyarakat, dan lembaga berwenang menjadi keharusan agar kandungan gizi makanan sesuai dengan standar dan distribusi aman. Tanpa basis keilmuan dari para ahli dan para pakar yang kuat, MBG berisiko besar salah arah.

Keempat, penanganan kesehatan bagi peserta didik yang terdampak. Kasus keracunan makanan tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah harus memastikan ada penanganan medis cepat dan dukungan kesehatan berkelanjutan bagi anak-anak yang menjadi korban.

Depankan prinsip utama yang dikemukakan Marcus Tullius Cicero bahwa *salus populi suprema lex esto*. Artinya, keselamatan rakyat ialah hukum tertinggi. Perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan. Selain itu, transparansi informasi mengenai kasus itu juga penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Kelima, sasaran program harus tepat. MBG sebaiknya difokuskan hanya bagi kelompok masyarakat marginal yang benar-benar membutuhkan. Dengan fokus pada kelompok rentan, anggaran negara akan lebih hemat, tepat guna, dan efektif meningkatkan kualitas gizi peserta didik yang rawan kekurangan gizi.

Keenam, pengelolaan berbasis sekolah. Pelaksanaan program dapat

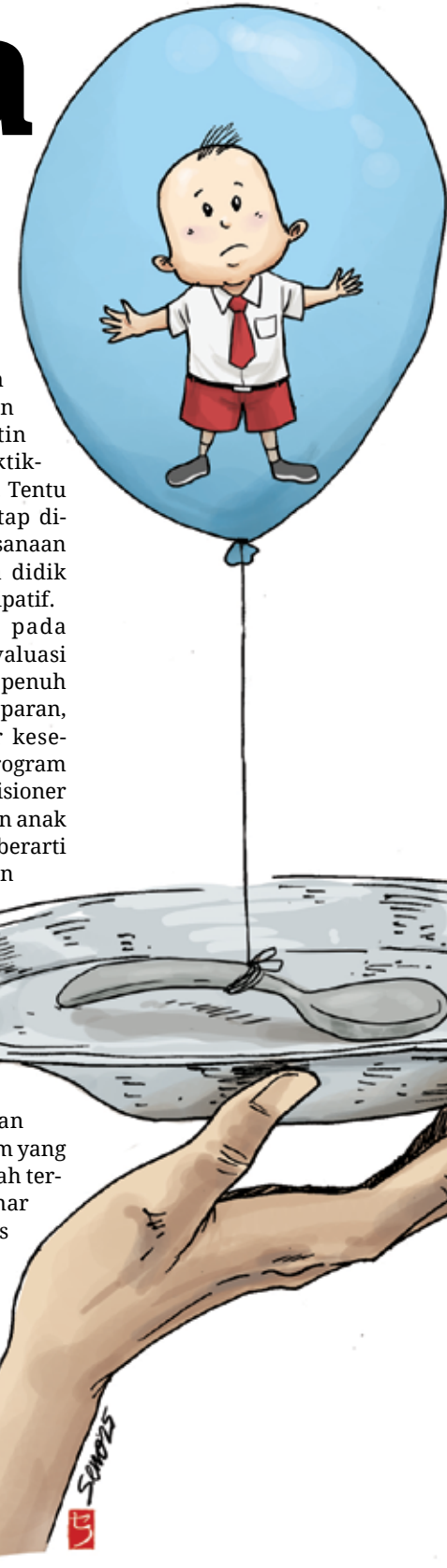
diserahkan kepada sekolah dengan melibatkan komite sekolah atau kantin sekolah. Dengan mekanisme itu, kontrol terhadap program menjadi lebih kuat, transparansi lebih terjaga, dan akuntabilitas lebih tinggi dan menghidupkan kantin-kantin sekolah seperti juga dipraktikkan di beberapa negara lain. Tentu pengawasan pemerintah tetap diperlukan, tetapi basis pelaksanaan yang dekat dengan peserta didik akan lebih efisien dan partisipatif.

Berbagai upaya di atas pada dasarnya menjadi upaya evaluasi agar MBG dijalankan dengan penuh kehati-hatian, terukur, transparan, dan sesuai dengan standar kesehatan masyarakat. Apalagi program MBG merupakan kebijakan visioner yang menyangkut masa depan anak bangsa. Namun, tetap tidak berarti membiarkan program berjalan tanpa koreksi.

Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kelemahan yang ada dapat diperbaiki, dari tata kelola, pengawasan mutu, hingga sasaran program yang tepat. Dengan langkah-langkah tersebut, MBG dapat benar-benar menjadi program strategis yang menyehatkan, memperkuat kualitas generasi muda, serta berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

MENGGERUS ANGGARAN PENDIDIKAN

Salah satu hal mendasar yang harus ditata



ulang ialah persoalan pembiayaan MBG yang tidak boleh mengambil alokasi dari 20% anggaran pendidikan dalam APBN. Sebagaimana dilansir berbagai media, alokasi anggaran pendidikan dari APBN 2026 yang sudah disahkan DPR mencapai Rp 769,1 triliun. Namun, hampir 30%-nya, atau sebanyak Rp223 triliun, dipakai untuk program MBG.

Idealnya anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi difokuskan untuk tujuan utama, yakni pemerataan akses, peningkatan mutu, dan penguatan kapasitas pendidikan nasional. Dana tersebut vital bagi penyediaan sarana-prasarana, peningkatan kualitas guru, dan kesempatan belajar yang merata bagi seluruh anak bangsa.

Jika MBG tetap dibiayai dari pos anggaran pendidikan, dikhawatirkan akan terjadi pengalihan fokus dan penyusutan anggaran bagi kebutuhan inti pendidikan. Hal itu berpotensi melemahkan upaya peningkatan kualitas dan menurunkan daya saing pendidikan kita. Kualitas pendidikan kita akan semakin tertinggal dengan bangsa lainnya.

Oleh karena itu, pendanaan MBG sebaiknya perlu ditempatkan dalam skema khusus di luar anggaran pendidikan, misalnya melalui program kesehatan masyarakat atau jaring pengaman sosial. Dengan demikian, pendidikan tetap berjalan optimal tanpa dikorbankan program nonakademik.

Program MBG tetap bisa hadir sebagai pelengkap yang strategis, tetapi tidak menggerus hak dasar masyarakat atas layanan pendidikan yang berkualitas. MBG ialah program yang perlu didukung semua pihak, tetapi sekali lagi pos anggarannya tidak dari anggaran pendidikan. DPR dan pemerintah sejatinya menavigasi sistem penganggaran pendidikan yang baik, proporsional, dan profesional.

Kembalinya Koleksi Dubois: Rekonsiliasi Hukum dan Moral

Ismunandar

Staf Ahli Hubungan Antarlembaga Kemenbud dan Ketua Tim Ahli Repatriasi OPK dan Cagar Budaya Indonesia

MENTERI Kebudayaan baru-baru ini menegaskan kepulangan ribuan fosil sangat penting bagi identitas Indonesia. Langkah itu menyatukan kembali serpihan sejarah yang hilang dan merupakan bentuk rekonsiliasi atas masa kolonial. Tulisan ini ingin menambahkan bahwa repatriasi itu juga merupakan pengakuan kesalahan Belanda. Selama lebih dari seabad, Belanda menyimpan sebuah harta karun yang hakikatnya bukan milik mereka, baik secara hukum maupun moral.

DASAR HUKUM TAK TERBANTAHKAN

Kisah dimulai dengan Eugene Dubois, seorang dokter Belanda. Ia datang ke Hindia Belanda untuk membuktikan teori evolusi. Dengan

dukungan penuh pemerintah kolonial, ia melakukan penggalian di Trinil, Jawa Tengah. Hasilnya ialah temuan spektakuler *Pithecanthropus erectus* atau 'Manusia Jawa'. Namun, status kepemilikan koleksi itu sejak awal jelas.

Dekrit Gubernur Jenderal 1889 menegaskan fosil yang ditemukan harus 'ditempatkan di bawah Pemerintah'. Dalam konteks ini, 'Pemerintah' merujuk pada pemerintah kolonial di Batavia, bukan Belanda di Den Haag.

Koleksi kemudian dikirim ke Leiden dengan satu syarat penting. Fosil-fosil itu hanya dipinjamkan untuk dipelajari dan dideskripsikan Dubois. Bukan untuk diserahkan secara permanen. Dubois sendiri meninggal pada 1940 tanpa menyelesaikan pekerjaannya. Karena

syarat itu tidak terpenuhi, pemindahan kepemilikan ke Belanda pun tidak pernah terjadi.

KERUGIAN ILMIAH INDONESIA

Koleksi Dubois ialah harta yang tak ternilai. Ia terdiri dari banyak holotipe yang menjadi acuan penelitian ilmiah modern. Ukuran, keragaman, dan kualitas spesimennya tidak ada duanya. Para ahli menegaskan ketiadaan koleksi itu telah menghambat perkembangan paleontologi di Indonesia.

Selama puluhan tahun, ilmuwan Indonesia kesulitan mengakses materi fundamental bagi penelitian dan pendidikan mereka. Itu ialah bentuk ketidakadilan epistemik. Sebuah kekosongan yang menghambat pembangunan kapasitas ilmiah bangsa. Padahal, prinsip berbagi pengetahuan secara adil telah diamanatkan dalam Protokol Nagoya dan konvensi internasional lainnya.

LANDASAN MORAL YANG KUAT

Di balik debat hukum, terdapat narasi kelam yang sering diabaikan. Penggalian Dubois didukung sistem kolonial yang opresif. Hingga 50 pekerja paksa (rodi) diterjunkan dalam kondisi yang mengerikan. Dubois sendiri menyebut lokasi penggaliannya sebagai 'neraka Jawa'/'Java's hell'.

Sumber-sumber kolonial mencatat para pekerja kerap melarikan diri. Ada yang sakit, bahkan meninggal. Penelitian juga menunjukkan lahan penggalian di Trinil amay mungkin ialah sawah milik masyarakat setempat. Meski peraturan kolonial mengukui hak kompensasi, tidak ada bukti Dubois membayar ganti rugi. Sementara itu, banyak catatan Raden Saleh 30 tahun sebelumnya selalu memberikan kompensasi.

Yang lebih menyentuh, fosil-fosil itu bukanlah benda asing bagi masyarakat lokal. Mereka memiliki

pengetahuan tradisional tentang lokasi penemuannya. Sebuah desa bahkan dijuluki 'ladang laga rak-sasa' karena banyak ditemukan fosil tulang yang sangat besar. Desa lain dijuluki 'tulang gajah' karena banyak fosil gajah purba ditemukan. Fosil memiliki nilai spiritual, mitologis, dan ekonomis bagi warga setempat.

Sumber-sumber Belanda mencatat perlakuan halus. Mulai penolakan menunjukkan lokasi, 'pencurian' fosil, hingga lebih memilih menjual fosil temuan ke pedagang Tionghoa. Yang terakhir itu diduga karena ada kompensasi. Semua itu ialah bentuk penentangan terhadap pengambilalihan paksa. Ketika persuasif tidak berhasil, tim Dubois tidak segan menggunakan ancaman dan pemaksaan.

MELAMPAUI KEPEMILIKAN

Repatriasi koleksi Dubois sering dilihat sekadar soal memindahkan benda. Padahal, itu ialah soal mengembalikan narasi. Selama ini, sejarah manusia purba Nusantara lebih banyak ditulis dari perspektif kolonial. Kembalinya fosil itu memungkinkan Indonesia merekonstruksi identitasnya sendiri.

Itu juga soal keadilan restoratif.

Bukan hanya untuk negara, melainkan juga untuk masyarakat lokal di Trinil dan banyak tempat penggalian lainnya. Para leluhur merekalah yang dipekerjakan paksa. Lahan merekalah yang digali. Pengetahuan merekalah yang dipakai, tapi diabaikan.

Belanda telah mengakui bahwa pengembalian itu ialah bentuk rekonsiliasi. Sebuah langkah penting untuk membuka lembaran baru hubungan bilateral. Namun, maknanya lebih dalam bagi Indonesia. Itu ialah pemulihan kedaulatan atas warisan sendiri. Baik secara fisik maupun intelektual.

Keputusan repatriasi itu patut diapresiasi. Ia berdiri di atas dua kaki yang kukuh: hukum dan moral. Dari sisi hukum, kepemilikan Indonesia tak terbantahkan. Dari sisi moral, pengembalian ialah koreksi atas ketidakadilan masa lalu.

Kembalinya koleksi Dubois bukan akhir perjalanan. Itu ialah awal dari rekonstruksi identitas ilmiah Indonesia. Sebuah langkah menuju kemandirian dalam meneliti, memahami, dan menceritakan sejarahnya sendiri. Sebuah rekonsiliasi yang tidak hanya memulihkan masa lalu, tetapi juga membangun masa depan.

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105. (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, foto diri, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian *Media Indonesia* dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian *Media Indonesia*.

MEDIA INDONESIA

Pendir: Drs. H. Teuku Youssi Syah MSI (Alm)
Direktur Utama: Gaudensius Suhardi
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Abdul Kohar

Dewan Redaksi Media Group:
Ketua: Eiman Saragih (merangkap anggota)
Wakil Ketua: Arief Suditomo (merangkap anggota)
Anggota: Mohammad Mirdal Akib, Abdul Kohar, Gaudensius Suhardi, Budiyanto, Iskandar Zulkarnain, Ade Alawi

Dewan Pengarah: Lestari Moerdijat, Saur M. Hutabarat, Adrianto Machribe

Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Puntio
Kepala Divisi Multimedia & Artistik: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Henri Salomo, Windy Dyah Indriantari
Kepala Sekretariat Redaksi: Eni Kartinah
Redaktur: Agus Mulyawan, Akhmad Mustain, Aries Wijaksana, Basuki Eka P. Bintang Krisanti, Denny Parsaulan Sinaga, Heryadi, Indrastuti, Ivan Shombing, Mirza Andreas, Strina Hamid

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuki, Agung Wibowo, Akmal Fauzi, Andhika Prasetyo, Atalya Puspa, Budi Ernanto, Cahya Mulyana, Despian Nurhidayat, Dhika Kusuma Winata, Fathurozak, Ferdian Ananda Majni, Gana Buana, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Infa Firdausya, Indriyani Astuti, Insi Nantika Jelita, M. Ilham Ramadhan Avisena, M. Iqbal Al Machmudi, Mohamad Farhan Zhuhri, Permiana Pandega Jaya, Putri Anisa Yuliani, Putri Rosmalia Octavianyi, Rahmatul Fajri, Ramdani, Rifaldi Putra Irianto, Rizki Noor Alam, Siti Retno Wulandari, Sri Utami, Suryani Wandari Putri Pertiwi, Susanto, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Wisnu Arto Subari

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Asisten Kepala Divisi: Iis Zatinika
Redaktur: Eni Kartinah

CONTENT ENRICHMENT
Periset: Desi Yasmimi S, Gurit Adi Suryo,
Bahasa:
Redaktur: Adang Iskandar, Dony Tjiptonugroho,

ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi:
Redaktur: Annette Natalia, Briyanbodo Hendro, Mariansandes NKR
Staf Artistik: Amiluhur, Ananto Prabowo, Dedy, Duta Amarta, Nehemia Nosevy Kristanto, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Seno Aditya, Tutik Sunarsih
Olah Foto: Ade Rian H

BISNIS & PENGEMBANGAN
Direktur Bisnis & Pengembangan: G. Bernhard Rotinsulu
Kepala Divisi Sales & Marketing: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; **Surabaya:** (031) 5667359; **Yogyakarta:** Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORESPONDEN
Banten: Sumantri Handoyo (Tangerang)
Syrief Oebaidillah (Tangerang Selatan)
Jawa Barat: Dede Susianti (Bogor), Naviantri, Sugeng Sumaryadi (Bandung), Kisar Rajagukguk (Depok), Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Depi Gunawan (Cimahi), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Kristiadi (Tasikmalaya)
Jawa Tengah: Haryanto (Semarang), Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Widjajadi (Solo), Liliek Dhamawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes)
Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, **Jawa Timur:** Faishol Taselan (Surabaya), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Heri Susetyo (Sidoarjo), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghazi (Madura)
Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), **Sumatra Utara:** Apul Iskandar (Pematangsiantar), Yoseph Pencawan (Medan), Januari Hutabarat (Taput)

Sumatra Barat: Yose Hendra (Padang)
Kepr: Hendry Kremer (Batam), **Riau:** Rudi Kurniawansyah (Pekan Baru)
Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang)
Bengkulu: Marlansyah
Jambi: Solmi
Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya)
Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin)
Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu)
Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar)
NTB: Yusuf Riaman (Mataram)
Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta)
NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang)
Papua: Marcellus Kelen (Jayapura)
Papua Barat Daya: Martinus Solo

Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303
Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110
Fax Customer Service: (021) 5820476,
Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, **Telepon Distribusi:** (021) 5812077, **Telepon Percetakan:** (021) 5812086, **Harga Langganan:** Rp 112.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, **No. Rekening Bank:** a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, **Diterbitkan oleh:** PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, **Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:** Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520,

Telepon: (021) 5812088 (Hunting), **Fax:** (021) 5812105 (Redaksi), e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, **Percetakan:** Gramedia
Alamat: Jln. Palmerah Selatan 22-28 Jakarta Pusat 10270
Website: www.gramediaprinting.com

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN